

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip yang berakar kepada hukum syariah. Interpretasi harfiah dari riba memiliki arti yaitu pertumbuhan atau peningkatan.¹ Dalam istilah teknis, riba mengacu kelebihan. Selain itu, semua nilai dan transaksi harus didasarkan pada pembagian risiko, di mana setiap pihak berbagi risiko yang terkait dengan potensi keuntungan atau kerugian sesuai dengan ketentuan kesepakatan bisnis. Prinsip utama yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk perbankan syariah adalah terlibat dalam investasi yang baik secara etika dan moral. Kegiatan transaksi, dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus selaras dengan pedoman etika yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Perbankan syariah dalam kegiatan bisnisnya telah mengalami ekspansi di berbagai sektor, termasuk ritel, korporat, dan perdagangan internasional. Tingkat pertumbuhan tahunan perbankan syariah berada dalam kisaran 12% dan 15%.² Di Indonesia, Kontribusi keseluruhan bank syariah di sektor infrastruktur melalui pembiayaan secara langsung adalah sebesar 8,4%, dengan 2,8% dialokasikan ke sektor kelistrikan dan 2,5% ke sektor transportasi. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur secara total selama periode 2015-2019 adalah sebesar USD 342,57 miliar, di mana pemerintah berencana untuk membiayai sekitar 41%, BUMN diperkirakan akan membiayai 22%, dan sisanya sebesar 37% diproyeksikan akan dihimpun dari sektor swasta. Pemerintah membiayai sebagian besar proyek dengan menerbitkan surat berharga negara, baik berupa obligasi maupun sukuk. Obligasi pemerintah mendominasi dengan nilai IDR 1.701 triliun (USD 121,5 miliar) dan diikuti oleh sukuk negara (umumnya disebut SBSN) sebesar IDR 277 triliun (USD

¹ Borhan, J. T., & Saari, C. Z. "An Analysis of The Prohibition of Riba in the Quran," *Jurnal Usuluddin*, 19, (2004):pp45–60.

² Güngören, M. "The Development of the Islamic Financial System in Turkey Strategies Applications." *Springer*, (2013):pp. 225–236 https://doi.org/10.1007/978-3-319-01387-9_18.

19,78 miliar) yang merupakan 14% dari total surat berharga negara.³ Selain itu, dalam pelaksanaannya. Perbankan syariah di Indonesia melakukan pembiayaan infrastruktur mayoritas tidak secara langsung kepada proyek yang dilaksanakan, akan tetapi ikut melakukan pembiayaan sindikasi dan berpartisipasi kedalam pembiayaan obligasi pemerintah dalam hal ini instrumen SBSN.⁴

Perbankan syariah telah melakukan intergrasi dalam berbagai instrumen keuangan, produk tersebut termasuk *Mudharabah* dan *Murabahah* dalam rangka mendukung perdagangan internasional dan operasional perusahaan. Pedoman *International Trade Centre* memiliki panduan untuk menguraikan bagaimana berbagai perusahaan khususnya perusahaan berskala kecil di negara-negara berkembang dapat menggunakan instrumen produk perbankan syariah untuk mengkases pasar global dan untuk meningkatkan ekspor.⁵ Selain itu, sektor ini telah memperluas penawarannya dengan memasukkan dana investasi, manajemen aset, dan layanan asuransi Takaful untuk klien korporat.⁶ Industri ini telah berkembang pesat karena diperkenalkannya berbagai produk baru yang inovatif sesuai dengan Syariah dan meningkatnya permintaan pasar yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi pasar secara umum. Namun, produk rekening syariah dasar dan perdagangan pasar luar negeri menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan prinsip-prinsip dasar Syariah, terutama ketika bersinggungan dengan instrumen keuangan yang lebih inovatif dan pembiayaan perdagangan.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan investasi yang besar. Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 diperkirakan membutuhkan sekitar 442 triliun Rupiah hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Untuk mengatasi kebutuhan pendanaan yang signifikan ini, pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan dua skema

³ Comcec, "Infrastructure Financing through Islamic Finance in the Islamic Countries," Comcec Coordination Office, March 2019.

⁴ Comcec, *Infrastructure Financing* 2019.

⁵ International Trade Centre (ITC). "Islamic Banking: A Guide for Small and Medium-sized." *Enterprises Geneva: ITC*, x, (2009):101 p.

⁶ Güngören, M. "The Development of the Islamic Financial System in Turkey Strategies Applications." *Springer*, (2013):pp. 225–236 https://doi.org/10.1007/978-3-319-01387-9_18.

pembiayaan utama: alokasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).⁷

Meskipun Indonesia memiliki peluang investasi infrastruktur yang cukup besar di Asia, kajian mengenai *Public Private Partnership* (PPP) di Indonesia masih terbatas dalam literatur.⁸ Selain itu, arus masuk investasi asing langsung *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan, terutama di sektor manufaktur.⁹ Hal ini menggarisbawahi tantangan untuk menarik investasi asing untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan pendanaan, Indonesia perlu meningkatkan daya tarik investasinya dengan memperbaiki iklim bisnis dalam negeri, meningkatkan efisiensi kelembagaan pemerintah, meningkatkan tingkat pendidikan, dan memperbaiki infrastruktur yang ada.¹⁰ Selain itu, penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat membantu pemerintah dalam mengelola defisit anggaran, meskipun pendekatan ini membutuhkan ketahanan fiskal selama masa konsesi proyek.¹¹ Dengan mengadopsi strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Perbankan syariah telah mulai memantapkan diri sebagai alternatif yang signifikan di pasar pembiayaan proyek infrastruktur tetapi hal tersebut tetap menghadirkan peluang dan tantangan. Bukti menunjukkan bahwa berbagai bank syariah menawarkan pilihan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sesuai

⁷ Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R.. "Determination Of Financial Feasibility Of Indonesia's New Capital Road Construction Project Using Scenario Analysis." *PLANNING MALAYSIA*, (2021), 19(17). <https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.998>.

⁸ Wibowo, A., & Alfen, H. W.. "Government-led critical success factors in PPP infrastructure development." *Built Environment Project and Asset Management*, 5(1), (2015):121–134. <https://doi.org/10.1108/bepam-03-2014-0016>

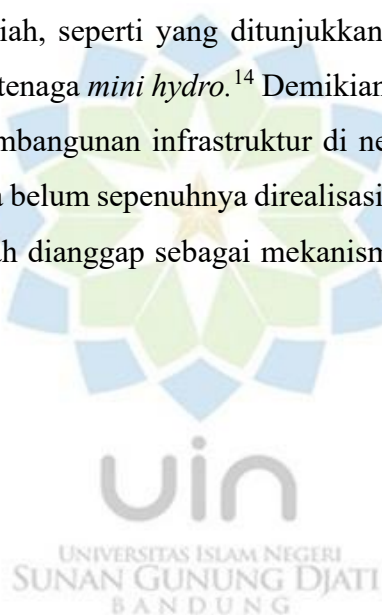
⁹ Lipsey, R. E., & Sjöholm, F. "Foreign direct investment and growth in East Asia: lessons for Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(1), (2011):35–63. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.556055>.

¹⁰ Lipsey, & Sjöholm. *Foreign direct*, 35–63.

¹¹ Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R.. "Determination Of Financial Feasibility Of Indonesia's New Capital Road Construction Project Using Scenario Analysis." *PLANNING MALAYSIA*, (2021), 19(17). <https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.998>.

dengan hukum Syariah.¹² Pendekatan ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir, mempertahankan stabilitasnya bahkan selama penurunan ekonomi.¹³

Keuangan syariah telah diimplementasikan di berbagai wilayah secara global untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Di Indonesia, bank-bank syariah secara aktif berpartisipasi dalam pendanaan infrastruktur dengan menggunakan skema syariah, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus proyek-proyek pembangkit listrik tenaga *mini hydro*.¹⁴ Demikian pula, pembiayaan syariah telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara negara Teluk (GCC); namun, potensinya belum sepenuhnya direalisasikan di negara-negara ini.¹⁵ Pembiayaan proyek syariah dianggap sebagai mekanisme untuk mengatasi defisit



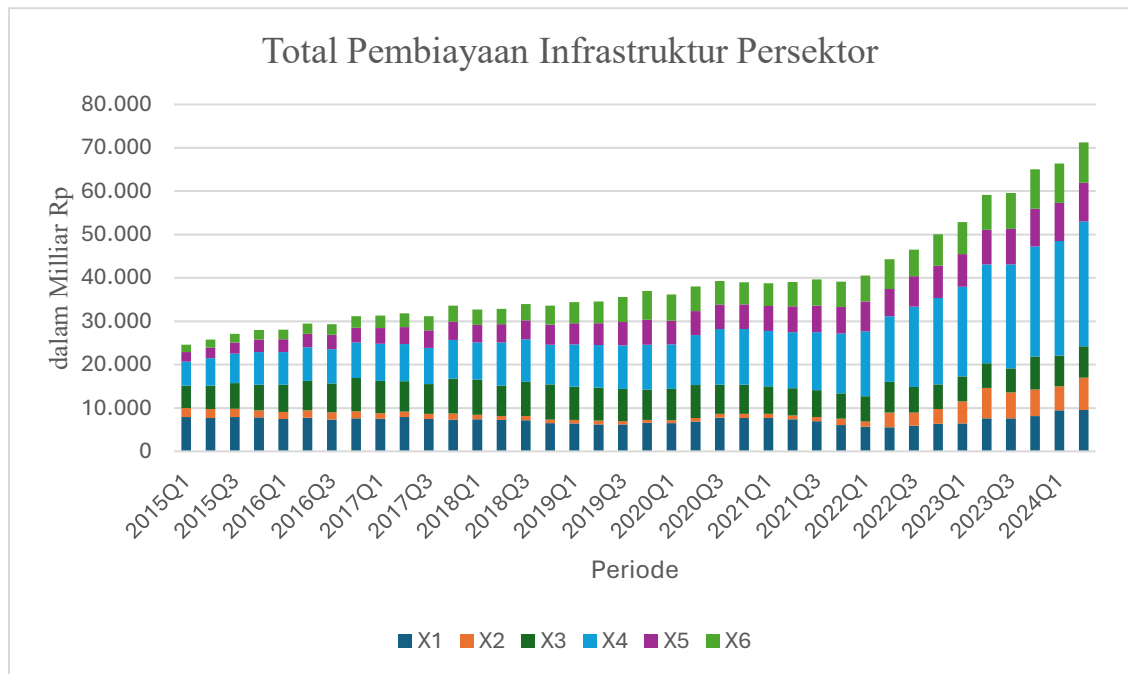
¹² Biancone, P. P., & Radwan, M. "Shariah-Compliant financing for public utility infrastructure." *Utilities Policy*, 52, (2018):88–94. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.03.006>

¹³ Shaikh, S. A. "Analysis of challenges and opportunities in Islamic banking." *International Journal of Financial Services Management* 7(3/4), (2014):286. <https://doi.org/10.1504/ijfsm.2014.065581>.

¹⁴ Rarasati, A. D. et al. "Islamic financing for Indonesia infrastructure project: mini hydropower plant case studies." *Infrastructure Asset Management*, 6(3), (2019),195–205. <https://doi.org/10.1680/jinam.18.00004>.

¹⁵ Tariq, W. "Why is Islamic infrastructure financing important for Qatar? A survey of Islamic project finance in the Gulf Cooperation Council countries." (2012). <https://doi.org/10.5339/qfarf.2012.aho6>.

antara kebutuhan infrastruktur dan pendanaan yang tersedia, bahkan di negara-negara non-Muslim seperti Italia.¹⁶



Gambar 1.1

Perkembangan Total Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Proyek Infrastruktur.

Lebih lanjut mengenai proyek infrastruktur yang berasal dari pembiayaan syariah. Grafik pada Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan total pembiayaan infrastruktur syariah per sektor di Indonesia pada periode 2015Q1 hingga 2024Q1. Secara umum, tren pembiayaan memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan yang relatif stabil pada periode awal (2015–2018) di kisaran Rp 20.000–30.000 miliar, kemudian meningkat secara signifikan sejak tahun 2021 hingga mencapai lebih dari Rp 70.000 miliar pada kuartal pertama 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pembiayaan perbankan syariah terhadap proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan, yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional serta penguatan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

¹⁶ Biancone & Shakhathreh, *Using Islamic*.

Jika ditinjau berdasarkan masing-masing sektor pada gambar 1.1 di atas, pembiayaan infrastruktur transportasi dan penyimpanan (X1) serta pendidikan (X5) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total pembiayaan sepanjang periode penelitian. Sektor kesehatan dan pekerjaan sosial (X6) serta agrikultur, kehutanan, dan perikanan (X4) memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Sementara itu, sektor teknologi informasi dan komunikasi (X2) serta listrik, gas, dan uap (X3) mengalami peningkatan signifikan terutama pada periode 2022–2024, yang mengindikasikan adanya pergeseran prioritas pembiayaan menuju digitalisasi dan ketahanan energi. Secara keseluruhan, pola pembiayaan ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan mendapatkan perhatian simultan dalam pembiayaan infrastruktur syariah, sehingga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berbasis pembiayaan syariah telah muncul sebagai alternatif strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)¹⁷, hingga saat ini tercatat sebanyak 17 proyek KPBU menggunakan pembiayaan syariah dengan nilai total Rp20,65 triliun merupakan pembiayaan secara langsung. Mayoritas proyek berada pada sektor jalan tol, dengan 12 proyek di antaranya, termasuk Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) yang memperoleh pembiayaan syariah sebesar Rp5,5 triliun melalui kontrak *Build Operate Transfer* (BOT). Di luar jalan tol, pembiayaan syariah juga diterapkan pada proyek non-tol, seperti Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel) senilai Rp645 miliar dengan akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*, serta proyek skala kecil seperti Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun senilai Rp45 miliar dengan skema *Availability Payment*. Implementasi ini melibatkan sejumlah perbankan syariah, antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, serta dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai bagian dari konsorsium pembiayaan. Fakta ini menunjukkan

¹⁷

[https://kneks.go.id/berita/692/implementasi-pembiayaan-syariah-pada-proyek-](https://kneks.go.id/berita/692/implementasi-pembiayaan-syariah-pada-proyek-kpbu?category=1)

[kpbu?category=1](https://kneks.go.id/berita/692/implementasi-pembiayaan-syariah-pada-proyek-kpbu?category=1)

bahwa pembiayaan syariah mampu menjangkau proyek infrastruktur lintas skala dan sektor.

Secara konseptual, skema KPBU dengan pembiayaan syariah mencerminkan sinergi antara prinsip keuangan syariah dengan strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Karakteristiknya yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada transparansi, keadilan, dan pembagian risiko, menjadikannya instrumen yang relevan dengan prinsip *maqasid* syariah.¹⁸ Keberhasilan pembiayaan syariah pada proyek infrastruktur strategis menegaskan efektivitasnya dalam memperluas peran swasta sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah baik secara nasional maupun global menjadi peluang besar dalam mengoptimalkan sumber pendanaan infrastruktur berkelanjutan.¹⁹ Dengan demikian, KPBU berbasis pembiayaan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif, efisien, dan selaras dengan prinsip keuangan Islam.

Prinsip-prinsip Islam menunjukkan kesesuaian dengan aspek-aspek fundamental keberlanjutan, termasuk alokasi sumber daya yang adil, konservasi lingkungan, dan menjaga generasi mendatang. Prinsip-prinsip Islam memberikan penekanan yang signifikan terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan syariah, yang mencakup kesetaraan, pembagian risiko, transaksi bebas bunga, dan keadilan sosial, dapat diterapkan pada praktik manajemen pendidikan dan bisnis untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.²⁰ Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kelangsungan operasional lembaga keuangan akan tetapi memperkuat tatanan budaya dan agama masyarakat Muslim. Selain itu, prinsip-prinsip keuangan

¹⁸ Al-Roubaie, A., & Sarea, A. "Islamic finance and sustainable development." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. (2019).

¹⁹ Kismawadi, M., et al. "Green Sukuk and sustainable infrastructure financing in Indonesia." *Journal of Islamic Finance*. (2024)

²⁰Jinan et al., "Holistic Integration: Syariah Finance Principles in Islamic Education Management." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), (2024):1343–1350. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2243>.

syariah yang berakar pada nilai-nilai agama Islam telah mendorong berbagai inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan dalam lingkungan dan sosial.²¹

Pengintegrasian paradigma mengenai keberlanjutan dan syariat Islam memberikan dukungan bagi seluruh sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Intergrasi nilai-nilai ke dalam proses pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, memungkinkan masyarakat Muslim untuk berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keimanan dan moral. Dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan, berbagai lembaga keuangan syariah memanfaatkan instrumen seperti obligasi sukuk untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Penerapan *green sukuk* banyak dilakukan selain pelaksanaan inisiatif pendanaan infrastruktur tetapi juga untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan²². Pendekatan inovatif ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.²³ Sebagai contoh, beberapa *green sukuk* telah berhasil diperkenalkan di Indonesia dan Malaysia sebagai sarana pembiayaan proyek-proyek infrastruktur hijau.²⁴

Keuangan syariah menunjukkan potensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh korelasi positif antara total simpanan, total pembiayaan, dan total aset bank-bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Aspek-aspek ini memfasilitasi perkembangan industri keuangan secara keseluruhan dan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk investasi di berbagai sektor. Selain itu, pertimbangan yang signifikan bahwa

²¹ Setiawan, I. "The Significance of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development: An Analysis from an Islamic Law Perspective." *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), (2023):e1206. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.1206>

²² Arifudin et al. "Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), (2024):12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>

²³ Piratti, M., & Cattelan, V. "Islamic green finance: A new path to environmental protection and sustainable development." *Islamic social finance*, (2018): pp. 144-172. Routledge.

²⁴ Saba, I., Khan, A., Jawed, H. "Islamic Finance and SDGs: Connecting Dots." *Islamic Finance and Sustainable Development: Palgrave Macmillan, Cham* (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_4.

perbankan syariah meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda tentang dampak perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Azouzi dan Echchabi dalam penelitiannya menunjukkan koefisien yang mengindikasikan hubungan jangka panjang yang negatif dan tidak pasti antara pertumbuhan perbankan syariah dan pembangunan ekonomi di Negara Kuwait.²⁵ Demikian pula di UEA, Echchabi dan Azouzi mengamati tidak adanya korelasi. Perbedaan hasil tersebut menjadi tantangan untuk hubungan yang sudah ada dan berpotensi memerlukan investigasi lebih lanjut terhadap variasi kontekstual dan kondisi saat ini.²⁶

Menurut Farikhi dkk, pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing karena membangun fondasi untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut. Pembiayaan proyek syariah dianggap sebagai salah satu alternatif yang paling layak untuk mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki basis investasi yang signifikan tetapi tidak memiliki pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan proyek syariah dianggap cocok untuk pembiayaan infrastruktur karena prinsip syariah menekankan investasi harus dihubungkan dengan asset dalam hal ini pada proyek sebagai aset yang menjadi dasar kesepakatan seperti yang ditegaskan oleh Farikhi dkk.²⁷

Namun, di wilayah negara-negara teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC), di mana keuangan syariah telah dicanangkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur, keuangan Islam dan aktivitas pasar modal di ranah proyek-proyek infrastruktur, tidak termasuk real

²⁵ Azouzi, D., & Echchabi, A. "Islamic banking and economic growth: the Kuwait experience." *Middle East J. of Management*, 1(2), (2013):186. <https://doi.org/10.1504/mejm.2013.057262>.

²⁶ Azouzi & Echchabi, Islamic banking, 186.

²⁷ Farikhi, A., Ismal, R., & Utomo, C. "Islamic Infrastructure Project Finance: A Literature Review." *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding*, 14(2), (2022): 1. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.2\(36\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.2(36))

estat, belum terlalu aktif secara signifikan.²⁸ Situasi ini memberikan peluang untuk terus tumbuh dan melakukan ekspansi. Selain itu, dalam hasil penelitian lain bahwa beberapa jenis keuangan syariah dapat dikaitkan dengan implikasi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Misalnya, Puspitasari dkk. melaporkan bahwa "pembiayaan mudharabah secara tidak terduga menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi." Akibatnya, tidak semua instrumen pembiayaan syariah saat ini sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁹

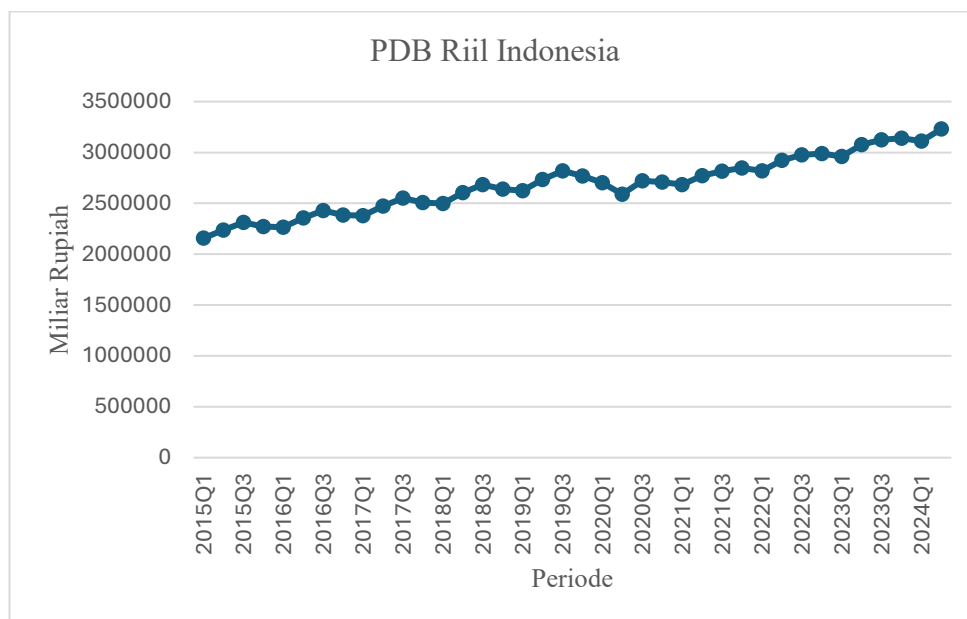
Dalam jangka pendek, perkembangan pasar obligasi syariah telah menunjukkan dampak yang signifikan namun memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan PDB.³⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan infrastruktur syariah melalui obligasi mungkin memiliki beberapa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Olehkarena itu, meskipun pembiayaan syariah sering dianggap menguntungkan, terutama untuk investasi infrastruktur, instrument tertentu dari berbagai pendanaannya atau pembiayaan sektoral juga masih memiliki dampak negatif.



²⁸ Tariq, W. "Why is Islamic infrastructure financing important for Qatar? A survey of Islamic project finance in the Gulf Cooperation Council countries." (2012). <https://doi.org/10.5339/qfarf.2012.aho6>.

²⁹ Puspitasari, F. H. dkk. "Modes Of Islamic Financing And Economic Growth: Evidence From Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, (2021) 7(3). <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1374>

³⁰ Naz, S.A., & Gulzar, S. "Impact Of Islamic Finance On Economic Growth: An Empirical Analysis Of Muslim Countries." *The Singapore Economic Review* (2020).



Gambar 1.2

Perkembangan PDB Riil Indonesia

Grafik PDB Riil Indonesia periode 2015Q1–2024Q2 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat secara konsisten dalam jangka panjang, meskipun disertai fluktuasi moderat pada beberapa periode. Pada awal pengamatan, nilai PDB riil berada di kisaran 215.8 triliun rupiah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai lebih dari 320 triliun rupiah pada 2024Q1. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi nasional serta peningkatan kapasitas produksi domestik selama periode penelitian. Namun demikian, terlihat adanya penurunan yang cukup nyata pada sekitar tahun 2020, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat gangguan eksternal seperti pandemi COVID-19. Setelah periode tersebut, PDB riil kembali menunjukkan proses pemulihan yang relatif cepat dan berlanjut ke jalur pertumbuhan positif hingga akhir periode observasi. Secara keseluruhan, pola data ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia memiliki resiliensi yang cukup kuat dalam menghadapi guncangan jangka pendek, sekaligus mempertahankan tren pertumbuhan riil secara berkelanjutan.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat khususnya selama era Orde Baru di bawah rezim Suharto (1966–1998), di mana

pertumbuhan ekonomi relatif tinggi akibat kebijakan ekonomi yang cenderung otoriter namun fokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Setelah masa tersebut, pada era demokrasi sejak 1999, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih moderat, tetapi tetap positif dan konsisten, mencerminkan keberhasilan reformasi institusional serta peningkatan keterbukaan ekonomi.³¹

Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh berbagai sektor seperti investasi di sektor digital dan keuangan syariah yang mulai menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, contohnya investasi di subsektor e-commerce syariah telah secara empiris mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,048% serta menambah pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan secara signifikan.³²

Selain itu, peran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) juga penting dalam mendorong pertumbuhan PDB riil Indonesia dengan efek pengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor industri. Penelitian pada konteks ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa FDI berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto sektor tertentu serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.³³

Secara keseluruhan, PDB riil Indonesia telah berkembang secara positif dengan dukungan dari reformasi ekonomi, investasi asing, digitalisasi ekonomi, dan pengembangan sektor baru seperti fintech dan e-commerce syariah. Namun, untuk mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan tersebut, Indonesia harus mengatasi tantangan utama berupa ketergantungan energi fosil serta lambatnya transisi ke energi terbarukan, hambatan teknologi dan regulasi terutama dalam sektor kendaraan listrik, masalah kesenjangan sosial dan kesempatan kerja, serta

³¹ Hill, H. "Asia's Third Giant: A Survey of the Indonesian Economy." *Economic Record*, 94(307), 2018:469–499. <https://doi.org/10.1111/1475-4932.12439>

³² Barata, A. "Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 2019:145–168. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053>

³³ Asri, M., & Limpo, L.. "Exploring the pathways accounting: Foreign direct investment as a catalyst for idiosyncratic risk, sectoral GDP, economic activity, and economic growth." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 2024:5812. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.5812>

tekanan makroekonomi seperti inflasi dan kecepatan peredaran uang. Peningkatan kebijakan yang mendukung teknologi ramah lingkungan, perluasan infrastruktur pengisian EV, insentif fiskal, serta peningkatan efektivitas pengelolaan moneter dan inklusi sosial akan berkontribusi pada penguatan pertumbuhan PDB riil Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.³⁴

Lebih dari itu, berbagai tantangan dihadapi oleh Indonesia khususnya dalam berbagai sektor infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menghadapi tantangan membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Studi di Afrika menunjukkan bahwa indeks pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita, meskipun dampaknya tidak signifikan untuk infrastruktur transportasi. Di Indonesia, pembangunan jaringan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menghubungkan wilayah serta membuka akses publik dan komoditas.³⁵ Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi menjadi tantangan utama. Rencana relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur membutuhkan dana sebesar 442 triliun Rupiah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan.³⁶

Sektor lainya seperti kurangnya infrastruktur listrik dan internet yang stabil merupakan kendala utama dalam penerapan infrastruktur kesehatan berbasis digital di Indonesia.³⁷ Hal ini menunjukkan kurangnya investasi dalam infrastruktur dasar dalam bidang ICT (*Information and Communication Technology*), terutama di daerah pedesaan. Kesenjangan digital terlihat jelas, dengan pasien yang lanjut usia, perempuan, dan penduduk pedesaan memiliki akses yang lebih sedikit ke

³⁴ Asri, M., & Limpo, L.. *Exploring the pathways*

³⁵ Priyanta, M., & Zulkarnain, C. S. A. "Sustainable Infrastructure Legal Policy in Indonesia: A National Strategic Project Approach for National Development." *Sriwijaya Law Review*: (2023). 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1108.pp1-18>.

³⁶ Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R.. "Determination Of Financial Feasibility Of Indonesia's New Capital Road Construction Project Using Scenario Analysis." *PLANNING MALAYSIA*, (2021), 19(17). <https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.998>.

³⁷ Hui et al., "Mapping national information and communication technology (ICT) infrastructure to the requirements of potential digital health interventions in low- and middle-income countries." *Journal of Global Health*, (2022): p.12. <https://doi.org/10.7189/jogh.12.04094>

infrastruktur ICT. Kendala pembiayaan tersirat dari kebutuhan Indonesia untuk bertransisi menuju sistem swadaya yang tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal.³⁸ Hal ini mengindikasikan tantangan yang lebih luas dalam membiayai infrastruktur dan layanan publik, termasuk ICT.

Kebutuhan sumber daya listrik terus mengalami peningkatan di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan pengembangan infrastruktur yang signifikan. Rencana Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Indonesia 2019-2028 mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga turbin di wilayah Sulawesi, dengan memanfaatkan distribusi LNG melalui *Small-Scale LNG Carriers* (SSLNG).³⁹ Rencana ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur logistik dan energi. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, implementasinya berjalan lambat. Indonesia berpotensi mencapai 100% listrik terbarukan dengan biaya rendah dengan memanfaatkan sumber daya matahari dan kapasitas penyimpanan energi hidro yang bersumber dari aliran sungai.

Namun, kebijakan energi saat ini didasarkan pada estimasi konservatif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang jauh lebih rendah daripada potensi kajian akademis dan industri.⁴⁰ Gas alam memainkan peran penting dalam bauran energi Indonesia, tetapi ada kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan. Sektor ketenagalistrikan di Indonesia telah mengalami peningkatan penggunaan gas alam yang signifikan, dari 7% pada tahun 1990 menjadi 62,3% pada tahun 2020. Tren ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan jangka panjang dan potensi pengurangan emisi karbon.

Di sektor kehutanan, implementasi kebijakan hutan kota masih belum optimal. Alokasi lahan untuk hutan kota di Jakarta, Surabaya, dan Malang masih

³⁸ Fonjungo et al., "Sustainable Financing for New Vaccines in Indonesia: Challenges and Strategies." *Sustainability*, (2022) 12(21), 9265. <https://doi.org/10.3390/su12219265>.

³⁹ Budiyanto et al., "Study on the LNG distribution to Mobile Power Plants using a Small-Scale LNG Carrier for the case of the Sulawesi region of Indonesia." *Energy Reports*., 8, (2021):374–380. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.11.211>

⁴⁰ Langer et al., "Review of Renewable Energy Potentials in Indonesia and Their Contribution to a 100% Renewable Electricity System." *Energies*, 14(21), (2021):7033. <https://doi.org/10.3390/en14217033>

jauh di bawah 10% dari total luas wilayah seperti yang ditargetkan dalam kebijakan.⁴¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Untuk sektor perikanan, khususnya budidaya lobster, terdapat kendala regulasi yang membatasi penangkapan benih lobster. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen lobster terbesar di dunia, regulasi yang ada justru menghambat pengembangan industri budidaya lobster.⁴²

Infrastruktur pendukung seperti teknologi budidaya dan fasilitas pembenihan juga masih terbatas. Di sektor pertanian, khususnya agroforestri, terdapat masalah akses pasar dan infrastruktur pasca panen yang masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari rendahnya ketahanan petani agroforestri, terutama dari segi modal finansial, selama pandemi COVID-19.⁴³ Secara umum, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan teknologi, sumber daya manusia terampil, serta infrastruktur pendukung di sektor-sektor tersebut.⁴⁴ Diperlukan peningkatan investasi dan dukungan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur ini agar dapat mendorong perkembangan sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan secara optimal.

Infrastruktur pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan perubahan teknologi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran yang sesuai dengan standar kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara peralatan praktikum di sekolah dengan peralatan yang ada di industri, yang membutuhkan solusi yang tepat dan efektif. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memaksa sistem pendidikan

⁴¹ Fitria et al., "Indonesian urban forest policies, practice and bioenergy potential of urban forest tree species." *Arboricultural Journal*, (2022): 99–121. <https://doi.org/10.1080/03071375.2021.2014706>

⁴² Priyamobodo et al., "Assessment of the lobster puerulus (*Panulirus homarus* and *Panulirus ornatus*, Decapoda: Palinuridae) resource of Indonesia and its potential for sustainable harvest for aquaculture. (Aquaculture:2020), 528, 735563. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735563>

⁴³ Sanudin et al., "Agroforestry farmers' resilience in social forestry and private Forest programs during the COVID-19 pandemic in Indonesia." *Forest Science and Technology*, 19(3), (2023):197–209. <https://doi.org/10.1080/21580103.2023.2222156>

⁴⁴ Andadari et al., "Lens on Tropical Sericulture Development in Indonesia: Recent Status and Future Directions for Industry and Social Forestry." *Insects*: 13(10), (2022): 913. <https://doi.org/10.3390/insects13100913>

Indonesia untuk segera merevolusi metode pengajarannya agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi dan pasca-pandemi.⁴⁵ Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan hybrid.

Kondisi dalam sektor kesehatan menunjukan bahwa rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Di Kabupaten Kuantan Singingi, hanya 54,4% ibu melahirkan di fasilitas kesehatan.⁴⁶ Tingkat pemanfaatan yang rendah ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan. Akses ke layanan kesehatan ditemukan sebagai faktor dominan yang memengaruhi persalinan di fasilitas kesehatan, yang mengindikasikan bahwa keterbatasan infrastruktur mungkin menjadi penghambat akses.⁴⁷

Pandemi COVID-19 telah memperparah tantangan infrastruktur yang ada. Hal ini berdampak pada penyediaan layanan kesehatan esensial, termasuk layanan antenatal di daerah pedesaan. Ibu hamil menghadapi hambatan seperti masalah transportasi dan aktivitas sosial yang terbatas karena kebijakan tinggal di rumah⁴⁸. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur layanan kesehatan untuk memastikan kesinambungan layanan selama krisis. Transisi Indonesia menuju sistem imunisasi swadana menghadirkan tantangan infrastruktur.

Negara perlu mempertimbangkan biaya di luar pengadaan vaksin, termasuk mengirimkan vaksin ke daerah terpencil dan mengimplementasikan infrastruktur yang diperlukan untuk pengiriman vaksin.⁴⁹ Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur layanan kesehatan, terutama di daerah

⁴⁵ Indrawati, Sri & Kuncoro, Ari. "Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57. (2021):29-59. 10.1080/00074918.2021.1909692.

⁴⁶ Sukirman et al., "Determinants of healthcare facility utilization for childbirth in Kuantan Singingi regency, Riau province, Indonesia 2017." *BMC Public Health*, 20(1), (2020). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09035-3>

⁴⁷ Sukirman et al, Determinants of healthcare, 20.

⁴⁸ Anggraeni et al., "Exploring the antenatal care challenges faced during the COVID-19 pandemic in rural areas of Indonesia: a qualitative study." *BMC Pregnancy and Childbirth* (2023), 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05495-8>

⁴⁹ Fonjungo et al., "Sustainable Financing for New Vaccines in Indonesia: Challenges and Strategies. *Sustainability*." (2022) 12(21), 9265. <https://doi.org/10.3390/su12219265>. (2021).

terpencil. Layanan kesehatan jiwa menghadapi keterbatasan infrastruktur yang signifikan. Penyebaran praktisi kesehatan jiwa yang terbatas dan aksesibilitas yang buruk terhadap informasi layanan.⁵⁰ Pandemi COVID-19 semakin mengganggu akses ke layanan kesehatan jiwa, sehingga menyoroti kebutuhan akan sistem layanan kesehatan jiwa yang lebih tangguh.⁵¹

Berbagai temuan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Maka dari itu, pembiayaan syariah untuk proyek-proyek infrastruktur dapat dilakukan dengan pendekatan lebih berhati-hati, dan memerlukan strategi harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang menguntungkan sebagai alternatif pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut dampak spesifik dari pembiayaan infrastruktur syariah oleh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian “Dampak Pembiayaan Infrastruktur Perbankan Syariah Berkelanjutan pada Proyek Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti mempunyai pendapat bahwa dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Olehkarena itu, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor ekonomi (transportasi dan penyimpanan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?
2. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor ekonomi (teknologi informasi dan komunikasi) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?

⁵⁰ Putri et al., “Exploring the perceived challenges and support needs of Indonesian mental health stakeholders: a qualitative study.” *International Journal of Mental Health Systems* (2021), 15(1). <https://doi.org/10.1186/s13033-021-00504-9>

⁵¹ Anindyajati et al., “The Right to Health: COVID-19 Pandemic and the Opportunity to Transform Mental Health Inequalities in Indonesia.” *Frontiers in Public Health* (2022). 10. 844656. 10.3389/fpubh.2022.844656.

3. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastrukture sektor lingkungan (listrik, gas, dan uap) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?
4. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor lingkungan (agrikultur, perhutanan, dan perikanan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?
5. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor sosial (pendidikan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?
6. Seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor sosial (kesehatan dan pekerjaan sosial) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia?
7. Apakah terdapat mekanisme koreksi kesalahan (keseimbangan jangka pendek) yang signifikan antara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor transportasi dan penyimpanan, teknologi informasi dan komunikasi, energi listrik gas uap, agrikultur perhutanan perikanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Rill PDB)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari rumusan masalah. Maka dari itu, tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor ekonomi (transportasi dan penyimpanan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor ekonomi (teknologi informasi dan komunikasi) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;

3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastrukture sektor lingkungan (listrik, gas, dan uap) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;
4. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor lingkungan (agrikultur, perhutanan, dan perikanan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;
5. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor sosial (pendidikan) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;
6. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pembiayaan infrastruktur perbankan syariah yang berkelanjutan dalam infrastruktur sektor sosial (kesehatan dan pekerjaan sosial) terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia;
7. Untuk mengetahui adakah mekanisme koreksi kesalahan (keseimbangan jangka pendek) yang signifikan antara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor transportasi dan penyimpanan, teknologi infromasi dan komunikasi, energi listrik gas uap, agrikultur perhutanan perikanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Adapun secara lebih rinci manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis / Akademis

Penelitian ini membahas kesenjangan khususnya dalam literatur yang ada, guna memeriksa hubungan yang kompleks antara keuangan syariah, konsep berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi peran pembiayaan syariah dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan, penelitian ini memberikan pengetahuan baru dan menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Diharapkan bahwa berbagai temuan ini akan memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga dalam bidang keuangan syariah, keberlanjutan, dan

pembangunan ekonomi, serta memberikan rujukan terhadap keputusan kebijakan dan praktik industri di Indonesia dan sekitarnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatalisasi oleh pembangunan infrastruktur maka dari itu hal tersebut menjadi perhatian di berbagai negara. Pernyataan ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembiayaan infrastruktur, infrastruktur fisik, dan investasi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional (misalnya, Febriyansyah, 2025; Sojka dan Pietrucha, 2024; Zeng dan Ziang, 2023; Ranjan dkk., 2019; Olayide, 2023; Arvin dkk., 2021). Akan tetapi, penelitian mengenai pembiayaan infrastruktur secara syariah khususnya di perbankan syariah masih terbatas dalam studi empiris.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, signifikansi secara teoritis dalam penelitian ini ialah mengintegrasikan berbagai prinsip keuangan Syariah dengan konsep pembangunan berkelanjutan, hal tersebut memberikan perspektif baru peran dari pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman tentang potensi sinergi antara praktik keuangan syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menawarkan kerangka teoritis untuk penelitian di masa yang akan datang dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang model pembiayaan alternatif untuk pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks negara berkembang dengan populasi Muslim yang signifikan.

Secara empiris, penelitian ini menyajikan bukti kuantitatif mengenai pengaruh pembiayaan infrastruktur syariah terhadap berbagai sektor ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metodologi ekonometrika yang relevan, khususnya model Autoregressive Distributed Lag (ARDL), penelitian ini menghasilkan temuan-temuan empiris yang kuat terkait hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris ini tidak hanya menambah literatur akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan lembaga keuangan yang ingin memanfaatkan pembiayaan syariah untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah, bank, dan investor dengan menyajikan bukti empiris mengenai manfaat dan tantangan yang terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan. Kerangka penelitian ini berharap menjadi salahsatu pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyelaraskan praktik mereka dengan tujuan pembangunan nasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai temuan ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga tersebut dalam rangka mengembangkan produk pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan metodologi penilaian risiko untuk proyek-proyek berkelanjutan, dan meningkatkan kontribusi mereka secara keseluruhan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, dengan berbagai temuan dari penelitian ini diharapkan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia dapat memperluas potensi pembiayaan berkelanjutan melalui perbankan syariah untuk pembangunan infrastruktur. Lalu, diharapkan berpotensi untuk menjadi sumber informasi rujukan bagi para regulator, seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini dapat mencakup pengembangan kerangka kerja peraturan baru, struktur insentif, atau pedoman yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan.

Studi ini memberikan hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sektor infrastruktur, termasuk transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Hasil analisis dari berbagai sektor tersebut dapat menjadi sumber informasi untuk membuat strategi kebijakan ataupun investasi yang tepat. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang unik di setiap sektor, penelitian ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan investor untuk menyesuaikan pendekatan. Pemahaman terperinci ini dapat memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih efektif, penentuan prioritas proyek, dan pengembangan solusi pembiayaan sektoral yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor infrastruktur.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berfungsi sebagai pendekatan terstruktur untuk menjadi pedoman dan mengatur sebuah penelitian, memberikan landasan untuk memahami fenomena dan hubungan yang kompleks dalam konteks penelitian. Kerangka kerja atau penelitian ini biasanya terdiri dari konsep-konsep kunci, teori, dan variabel yang relevan dengan pertanyaan penelitian.⁵² Kerangka konseptual pada Gambar 2.1 untuk penelitian ini menggambarkan hubungan antara proyek pembiayaan infrastruktur yang menggunakan perbankan syariah sebagai pembiayaan berkelanjutan, yang mencakup tiga sektor utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga kategori variabel independen: pertama, sektor pembiayaan infrastruktur ekonomi (transportasi & penyimpanan, dan informasi & komunikasi); kedua, sektor pembiayaan infrastruktur lingkungan (pertanian, kehutanan, perikanan, dan listrik, gas, uap); dan yang terakhir, sektor pembiayaan infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB Riil Indonesia.

Ketiga kategori variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan *Endogenous Growth Theory* dan *Financial-Growth Nexus*, karena pembiayaan syariah pada sektor infrastruktur ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat mendorong pertumbuhan PDB riil melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan kualitas sumber daya manusia. Sektor infrastruktur ekonomi seperti transportasi serta informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi distribusi, konektivitas, dan adopsi teknologi; sektor infrastruktur lingkungan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, serta energi memperkuat kapasitas produksi dan keberlanjutan ekonomi; sedangkan sektor infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial meningkatkan modal manusia (human capital) dan produktivitas tenaga kerja. Menurut Romer (1986) dan Lucas (1988), investasi pada

⁵² Guntur, G. "A Conceptual Framework For Qualitative Research: A Literature Studies." *Capture : Jurnal Seni Media Rekam*, 10(2), (2019): 91–106. <https://doi.org/10.33153/capture.v10i2.2447>

modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁵³ sedangkan Levine (1997) menegaskan bahwa perkembangan sektor keuangan berperan penting dalam memobilisasi dana dan menyalurkannya ke sektor produktif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁵⁴

Berikut merupakan penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

1. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Transportasi Dan Penyimpanan Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai Endogeneous Growth Economic mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁵⁵ Maka dari itu, Pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor infrastruktur transportasi dan penyimpanan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut di tunjukan dengan pengembangan pasar sukuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dengan peningkatan 1 unit volume sukuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,5%, peningkatan sukuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah seperti sukuk dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

Disisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur hijau. Risiko utama yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) terkhusus hasil penelitian di Cina meliputi kebijakan

⁵³ Romer, P. M. "Increasing returns and long-run growth." *Journal of Political Economy*, 94(5), 1986:1002–1037.

⁵⁴ Levine, R. "Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 1997:688–726.

⁵⁵ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

⁵⁶ Yildirim, S., Yildirim, D. C., & Diboglu, P. "Does Sukuk market development promote economic growth?" *PSU Research Review*, 4(3), (2020): 209–218. <https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011>

dan regulasi, risiko keuangan, dan risiko teknis.⁵⁷ Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, diperlukan peningkatan ketersediaan opsi pembiayaan, pengembangan pedoman teknis yang terstandarisasi, serta kerangka hukum dan regulasi yang mendukung.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah berkelanjutan untuk infrastruktur transportasi dan penyimpanan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi dampak lingkungan. Indeks kinerja logistik lingkungan (ELPI) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kinerja logistik tinggi umumnya juga memiliki kinerja baik dalam transportasi hijau.⁵⁸ Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur transportasi dan penyimpanan yang berkelanjutan melalui pembiayaan syariah dapat memberikan manfaat ganda berupa peningkatan efisiensi ekonomi dan perlindungan lingkungan.

2. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai *Endogeneous Growth Economic* mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁵⁹ Maka dari itu, kerangka berpikir mengenai pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengembangan TIK, termasuk melalui pembiayaan syariah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme.⁶⁰ Penelitian menunjukkan bahwa difusi TIK, pengembangan keuangan, dan

⁵⁷ Dai, Y., & Solangi, Y. A. "Evaluating and Prioritizing the Green Infrastructure Finance Risks for Sustainable Development in China." *Sustainability*, 15(9), (2023):7068. <https://doi.org/10.3390/su15097068>

⁵⁸ Lu, M., et al., "Green Transportation and Logistics Performance: An Improved Composite Index." *Sustainability*, 11(10), (2019):2976. <https://doi.org/10.3390/su11102976>

⁵⁹ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

⁶⁰ Barata, A. "Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, no. 1, May 2019, pp. 145-68, doi:10.21098/jimf.v5i1.1053.

keterbukaan perdagangan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁶¹ Khususnya untuk pembiayaan syariah, studi kasus di Indonesia menemukan bahwa investasi sebesar 3,90 triliun rupiah di subsektor *e-commerce* syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,048% atau setara dengan peningkatan output ekonomi sebesar 5,08 triliun rupiah.⁶²

Selain itu, investasi tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai tambah bruto sebesar 0,072% atau 3,72 triliun rupiah, serta peningkatan pendapatan tenaga kerja nasional sebesar 795,36 miliar rupiah.⁶³ Namun, perlu diperhatikan bahwa dampak TIK terhadap lingkungan dapat bervariasi tergantung pada kualitas infrastruktur TIK di suatu negara. Negara-negara dengan kualitas TIK tinggi cenderung mengalami peningkatan keberlanjutan lingkungan, sementara negara-negara dengan kualitas TIK menengah dan rendah mungkin mengalami degradasi lingkungan.⁶⁴ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor TIK juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam implementasinya.

3. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Listrik, Gas, Dan Uap Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai *Endogeneous Growth Economic* mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁶⁵ Maka dari itu, pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor listrik, gas, dan uap memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan

⁶¹ Verma, A. et al., "Impact of ICT diffusion and financial development on economic growth in developing countries." *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 28(55), (2023):27–43. <https://doi.org/10.1108/jefas-09-2021-0185>

⁶² Barata, A. "Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, no. 1, May 2019, pp. 145-68, doi:10.21098/jimf.v5i1.1053.

⁶³ Barata, Strengthening National Economic pp. 145-68.

⁶⁴ Appiah-Otoo, I. et al., "The impact of information and communication technology (ICT) on carbon dioxide emissions: Evidence from heterogeneous ICT countries." *Energy & Environment*, 34(8), (2022):3080–3102. <https://doi.org/10.1177/0958305x221118877>

⁶⁵ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

ekonomi negara. Studi menunjukkan bahwa investasi infrastruktur energi, termasuk melalui kemitraan publik-swasta, berperan signifikan dalam meningkatkan pembangkit listrik terbarukan di negara-negara berkembang Asia.⁶⁶ Hal ini pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menariknya, terdapat *trade-off* antara dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan dan pengangguran. Meskipun pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi, efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran menurun seiring meningkatnya pangsa pembiayaan tersebut.⁶⁷ Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang didorong oleh pembiayaan syariah mungkin memerlukan inklusivitas yang lebih besar dan penciptaan lapangan kerja yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan, termasuk di sektor energi, berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan opsi pembiayaan dan pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung merupakan langkah penting untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan dampak positif pembiayaan infrastruktur hijau.⁶⁸

4. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Agrikultur, Perhutanan, Dan Perikanan Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai *Endogeneous Growth Economic* mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁶⁹ Maka dari itu, kerangka penelitian mengenai pembiayaan syariah

⁶⁶ Song, Y. et al., “Impact of energy infrastructure investments on renewable electricity generation in major Asian developing economies”, *Australian Economic Papers*, Wiley-Blackwell, Vol. 62 No. 1, (2022): pp. 1–23.

⁶⁷ Budi Cantika Yuli, S. and Rofik, M., “Implications of Sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth”, *Public and Municipal Finance*, Llc Cpc Business Perspectives, Vol. 12 No. 1, (2023): pp. 100–109.

⁶⁸ Dai, Y. and Solangi, Y.A., “Evaluating and Prioritizing the Green Infrastructure Finance Risks for Sustainable Development in China”, *Sustainability, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Mdpi)*, Vol. 15 No. 9, (2023): p. 7068.

⁶⁹ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

yang berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor pertanian, termasuk tanaman komersial, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebuah studi di Nigeria menemukan bahwa manfaat jangka panjang dapat dimaksimalkan melalui pendanaan yang tepat untuk produksi kapas dan kacang tanah.⁷⁰ Demikian pula, sektor perikanan telah menunjukkan hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Turki, seperti yang diungkapkan melalui analisis model *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL) dari tahun 1990-2019.⁷¹

Akantetapi, meskipun pembiayaan berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penting untuk dicatat bahwa penerapan praktik-praktik berkelanjutan dapat memiliki dampak yang bervariasi di berbagai kondisi. Sebagai contoh, di Islandia, privatisasi stok ikan dan penerapan kuota yang dapat dipindahtangankan secara individu menyebabkan konsolidasi di sektor perikanan dan migrasi dari desa ke kota, yang mengakibatkan masyarakat pesisir menjadi rentan.⁷² Hal ini menyoroti perlunya pertimbangan yang cermat terhadap dampak sosial di samping faktor ekonomi dan lingkungan.

Kesimpulannya, pembiayaan infrastruktur syariah yang berkelanjutan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas. Namun, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari pembiayaan tersebut, termasuk dampak sosial dan lingkungan, untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan di semua sektor.

⁷⁰ Asaleye, A.J. et al., “Cash crops financing, agricultural performance and sustainability: evidence from Nigeria”, *African Journal of Economic and Management Studies, Emerald Publishing*, Vol. 11 No. 3, (2020): pp. 481–503.

⁷¹ Eyuboglu, S. and Akmermer, B., “The Relationship between Economic Growth and Fisheries Production in Türkiye”, *Aquaculture Studies, Central Fisheries Research Inst*, Vol. 24 No. 2, (2023). available at:<https://doi.org/10.4194/aquast1017>.

⁷² Kokorsch, M. and Benediktsson, K., “Prosper or perish? The development of Icelandic fishing villages after the privatisation of fishing rights”, *Maritime Studies, Springer Nature*, Vol. 17 No. 1, (2018): pp. 69–83.

5. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Pendidikan Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai Endogeneous Growth Economic mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁷³ Maka dari itu, pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan studi yang ada, pembiayaan syariah secara umum terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷⁴ Khususnya, pembiayaan syariah dapat menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran menurun seiring meningkatnya pangsa pembiayaan tersebut.⁷⁵

Menariknya, meskipun pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan, dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan perlu diperhatikan. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan hijau (*green finance*) yang sejalan dengan prinsip syariah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.⁷⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya memadukan aspek syariah dan keberlanjutan dalam pembiayaan infrastruktur pendidikan.

Secara keseluruhan, pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan di sektor pendidikan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat, serta peningkatan opsi pembiayaan untuk memaksimalkan dampaknya.⁷⁷ Penting juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif dan optimal

⁷³ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

⁷⁴ Yıldırım, S. et al., “Does Sukuk market development promote economic growth?” *PSU Research Review*, 4(3), (2020): 209–218. <https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011>

⁷⁵ Budi Cantika Yuli, S. and Rofik, M., “Implications of Sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth”, *Public and Municipal Finance, Llc Cpc Business Perspectives*, Vol. 12 No. 1, (2023): pp. 100–109.

⁷⁶ Fu, W. and Irfan, M., “Does Green Financing Develop a Cleaner Environment for Environmental Sustainability: Empirical Insights From Association of Southeast Asian Nations Economies.”, *Frontiers in Psychology, Frontiers Media Sa*, Vol. 13 No. 121444, (2022), available at: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.904768>.

⁷⁷ Dai & Solangi, Evaluating and Prioritizing *Sustainability*, 15.

dalam penciptaan lapangan kerja.⁷⁸ Dengan pendekatan yang tepat, pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan di sektor pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Dampak Pembiayaan Infrastruktur Syariah Berkelanjutan Pada Sektor Kesehatan Dan Pekerjaan Sosial Terhadap Produk Domestik Bruto Rill di Indonesia

Dalam penelitian ini konsep dasar teori berasal dari Paul Romer (1986) mengenai *Endogeneous Growth Economic* mengenai investasi pada modal fisik, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi.⁷⁹ Maka dari itu, kerangka berpikir untuk keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan dalam sektor kesehatan dan pekerjaan sosial memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank-bank syariah yang mematuhi prinsip-prinsip *Maqasid* Syariah (MS) menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan syariah yang kurang mematuhi MS.⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penting dalam meningkatkan persaingan dan pertumbuhan pembiayaan di perbankan syariah.

Pasar sukuk, sebuah instrumen keuangan syariah, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Peningkatan volume sukuk sebesar satu unit meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,5%, sementara peningkatan densitas sukuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 1,7%.⁸¹ Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Di sektor kesehatan, baik pengeluaran kesehatan publik maupun swasta telah terbukti dapat mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan kualitas lingkungan di negara-negara

⁷⁸ Budi and Rofik, Implications of Sharia-compliant, pp. 100–109.

⁷⁹ Romer, P. M. *Increasing returns*. 1002–1037.

⁸⁰ Satyakti Y. Et al., "Sustainability Innovation in the Textile Industry: A Systematic Review," *Sustainability*, MDPI, vol. 15(2), (2023): pages 1-21, January.

⁸¹ Yildirim, S. et al., "Does Sukuk market development promote economic growth?" *PSU Research Review*, 4(3), (2020): 209–218. <https://doi.org/10.1108/prr-03-2020-0011>

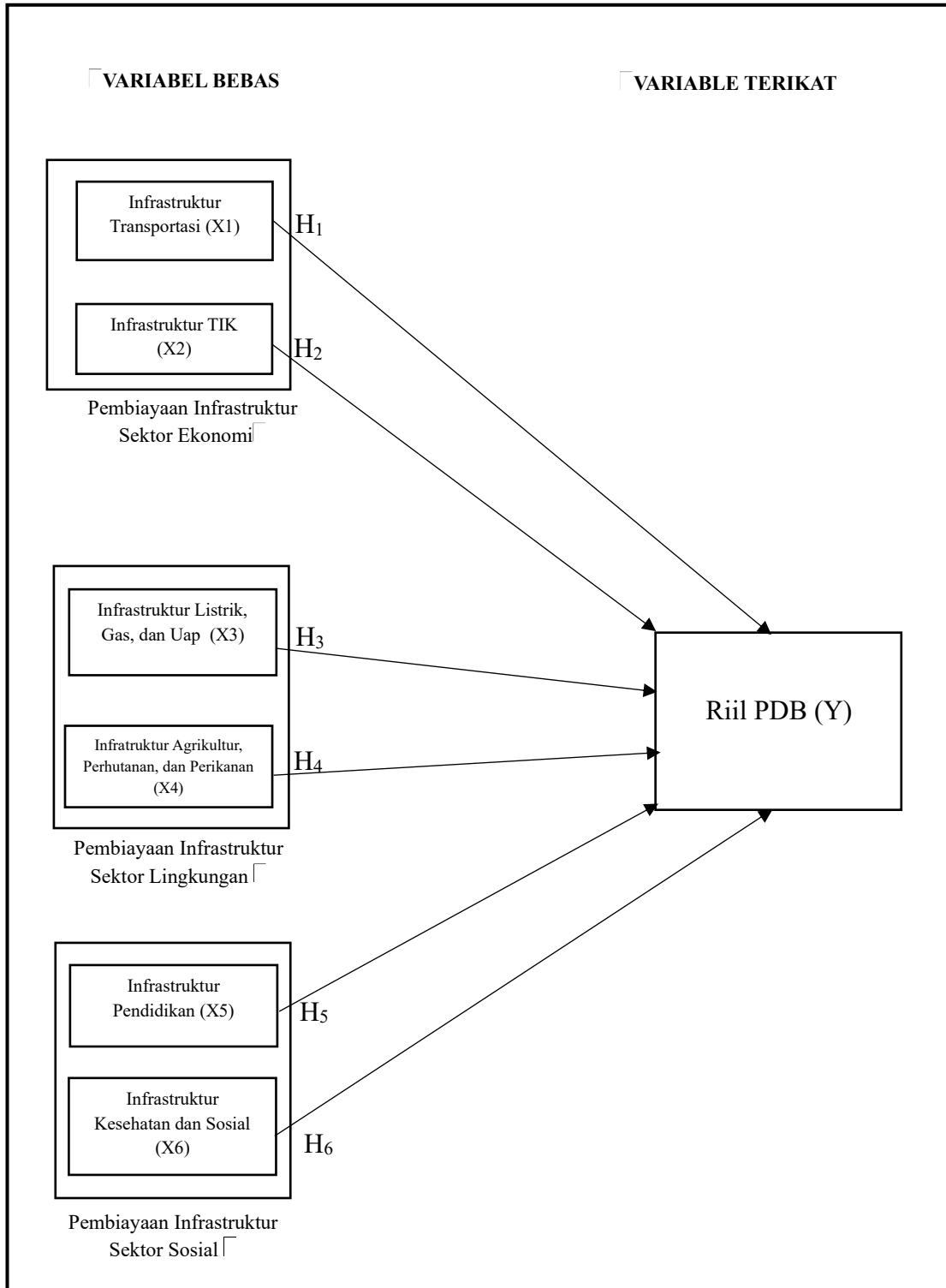
Asia.⁸² Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan di sektor kesehatan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Namun, penting untuk diketahui bahwa hubungan antara pengeluaran perawatan kesehatan dan dampak lingkungan sangatlah kompleks. Selama pandemi COVID-19, peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan di Malaysia dikaitkan dengan emisi CO₂ yang lebih tinggi.⁸³ Hal ini menyoroti perlunya kebijakan yang menyeimbangkan pertumbuhan sektor perawatan kesehatan dengan kelestarian lingkungan. Kesimpulannya, pembiayaan infrastruktur syariah yang berkelanjutan di sektor kesehatan dan pekerjaan sosial dapat secara positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong inklusi keuangan, mengurangi dampak lingkungan, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, desain kebijakan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini selaras dengan tujuan ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis diskusi sebelumnya melalui konsep dan temuan penelitian terdahulu, dapat di rancang sebuah kerangka berpikir untuk penelitian ini dengan melihat hubungan antara tiga sektor pembiayaan infrastruktur utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang di gambarkan melalui skema alur berpikir sebagai berikut:

⁸² Bilgili, F., Türker, O., Awan, A., Khan, M. and Kuşkaya, S, “The roles of economic growth and health expenditure on CO₂ emissions in selected Asian countries: a quantile regression model approach.”, *Environmental Science and Pollution Research, Springer Nature*, Vol. 28 No. 33, (2021): pp. 44949–44972.

⁸³ Samah, I.H.A., et al., “The Impact Of Healthcare Expenditure And Healthcare Sector Growth On Co₂ Emission Using Dynamic Panel Data System Gmm Estimation Model During Covid 19 Crisis”, *International Journal of Energy Economics and Policy, Econjournals*, Vol. 10 No. 6, (2020): pp. 235–241.



Gambar 1.3
Kerangka Berpikir

F. Hipotesis

Berdasarkan Alger dan Mohareb (2012), hipotesis ialah pernyataan yang berisi dugaan atau penjelasan spekulatif untuk mengkaji fenomena yang dapat di uji dan memiliki potensi tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut dapat berupa simpulan dari hasil investigasi maupun rancang biru yang menjelaskan istilah konkret apa yang di harapkan peneliti pada studi yang dilakukannya.⁸⁴ Berdasarkan Gambar 1.2 tentang kerangka berpikir. Berbagai variabel telah di identifikasi serta hubungan diantara semua variabel tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis jangka panjang karena sifat investasi infrastruktur yang membutuhkan waktu (*time lag*) untuk berdampak pada PDB. Selain itu, sesuai dengan pandangan Gujarati dan Porter (2009), penggunaan model koreksi kesalahan memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dinamika jangka pendek ke dalam analisis jangka panjang. Fokus pengujian hipotesis pada nilai jangka panjang dilakukan karena sifat variabel penelitian yang bersifat struktural, sementara signifikansi pada nilai *Error Correction Term* (ECT) digunakan sebagai bukti sah bahwa model memiliki mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan (ECM) meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek yang tidak konsisten.⁸⁵ Oleh karena itu, pengujian hipotesis selanjutnya difokuskan pada koefisien jangka panjang untuk melihat dampak permanen dari variabel independen terhadap PDB. beberapa hipotesis yang berhubungan dengan tujuan penelitian telah diformulasikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Infrastruktur Transportasi dan Penyimpanan terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₁ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor transportasi dan penyimpanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

⁸⁴ Mohareb, R. M. "Conducting Scientific Research: Research Hypothesis and Null Hypothesis." *Organic Chemistry: Current Research*, 1(2), (2012), <https://doi.org/10.4172/2161-0401.1000e105>

⁸⁵ Gujarati, D. N., & Porter, D. C.. "Basic Econometrics" (5th ed.). *New York: McGraw-Hill/Irwin*. 2009.

2. Pembiayaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₂ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

3. Pembiayaan Infrastruktur Energi Listrik, Gas, dan Uap terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₃ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor energi listrik, gas, dan uap terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

4. Pembiayaan Infrastruktur Agrikultur, Perhutanan, dan Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₄ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor agrikultur, perhutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

5. Pembiayaan Infrastruktur Pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₅ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

6. Pembiayaan Infrastruktur Kesehatan dan Pekerjaan Sosial terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₆ = Terdapat hubungan positif diantara pembiayaan infrastruktur syariah berkelanjutan pada sektor kesehatan dan pekerjaan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

7. Keseimbangan jangka pendek kepada jangka panjang pembiayaan infrastruktur perbankan syariah terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

H₇ = Terdapat mekanisme koreksi kesalahan (keseimbangan jangka pendek) yang signifikan antara pembiayaan infrastruktur perbankan syariah berkelanjutan pada sektor transportasi dan penyimpanan, teknologi informasi dan komunikasi, energi listrik gas uap, agrikultur perhutanan perikanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Riil PDB).

